

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA YAYASAN YANG BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN TANGERANG

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Pasal 4 menyebutkan "Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial." Yayasan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dalam kehidupan sehari-hari ditemukan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan, keuntungan Yayasan akan dimiliki seiring banyaknya badan usaha yang didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata yayasan, yayasan keagamaan berhak memiliki sebidang tanah dengan status kepemilikan hak milik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengapa yayasan dapat diberikan hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan bagaimana kepastian hukum terhadap pemberian hak milik atas tanah yayasan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *socio-legal research* yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian memberikan jawaban pelaksanaan permohonan hak milik dapat diperoleh oleh yayasan tapi belum banyak dilaksanakan, karena peraturan yang mengharuskan adanya surat penunjukan yayasan badan hukum yang dapat memiliki hak milik dari Direktur Djendral Agraria dan Transmigrasi sangat sulit diperoleh, hak milik yang diberikan atas nama yayasan bila akan dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain terlebih dahulu dimintakan izin kepada kantor pertanahan, karena kewajiban kepemilikan dicatat dalam buku tanah dan sertipikat bersangkutan, sistem pendaftaran negara Republik Indonesia Stelsel publisitas negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia terdaptarnya nama di dalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.

Saran dari penelitian ini kepada Pemerintah agar terhadap hukum pertanahan khususnya BPN pilihan sistem tersebut harus ditinjau dan diperbaiki agar lebih mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan HAT untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepada Yayasan agar datang langsung ke kantor pertanahan untuk melakukan pengurusan tanahnya demi kepentingan usaha keagamaan dan sosial, bagi kantor pertanahan Kabupaten Tangerang agar lebih memberikan kebijakan hak milik pada yayasan agar yayasan leluasa memanfaatkan kepemilikannya membangun usahanya di bidang keagamaan dan sosial. Kepada PPAT agar sebelum membuat AJB terhadap peralihan atas aset tanah atas nama yayasan harus memperhatikan Undang Undang Yayasan, peralihan pelaksanaan terhadap pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kata kunci: *Kebijakan, Hak Milik, Yayasan Yang Berbadan Hukum*

Abstract

The cooperation of the Land Office of Surakarta City Government In The Field Thematic Development Framework Based Object Number Tax (NOP)

Land is an asset of every human being in the world. It is Importance of soil for human life is because humans can not completely separated from the ground. Soil is a vital sector of public life. In addition, the soil has a social role for public needs people's lives with all fungsinya. TO overcome this established specially authorized agency dealing with issues concerning land, the National Land Agency, which in this case didelgasikan to the Land Office, a non-departmental government agencies that responsible directly to the president. Implementation of cooperation institutions actually have a huge influence in the public interest as it relates to land. So it needs a policy that encourages the implementation of effective policies in the area of land available. This is very important because it is through the development of thematic maps based Object Number Tax (NOP) which is a medium that provides spatial information thematic land in units of Thematic Map Parcel in District / City.

This research uses empirical juridical approach, data used is primary data. The data analysis is descriptive analytical study. Descriptive, the research aims to paint a picture of a thing in certain areas and at certain times. Analytical, meaning associated with theories of existing laws or regulations relating to the object under study. In accordance with Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2006 on the National Land Agency and Law (UU Badan Pertanahan Nasional) No. 12 of 1985 dated December 27, 1985 in conjunction with Act 12 of 1994, the true implementation of coordination between the Government of Surakarta and the BPN actually has a huge influence in the public interest as it relates to land. However, this needs to be pushed a policy that encourages the implementation of effective policies. Because even though it is set in a Regulation of the existing regulations but have not been able to be effective in its implementation. Hence the need, then the implementation need an appropriate mechanism so that the constraints of the existing owners of adjacent land has not had time to attend for any reason thus delayed the implementation of measurement, or the boundaries of land parcels that will be measured experiencing dispute or not it is clear. Therefore, it is necessary to set up specifically a team of field technical nature that seeks to monitor prior to implementation so that the implementation can be run properly.

Keywords : Cooperation, Land, Object Number Tax (NOP)